

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA SITUS ASTANA GEDE KAWALI OLEH DINAS PARIWISATA KABUPATEN CIAMIS

Oleh :

Dewi Silvia

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh
Jln. R.E Martadinata No.150 Ciamis Jawa Barat

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum optimalnya implementasi kebijakan tentang pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis. Hal ini dikarenakan masih kurangnya sarana dan parasarana penunjang pengembangan wisata, kurangnya persamaan persepsi diantara implementor serta masih kurangnya hubungan koordinasi dengan instansi-instansi terkait. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merumuskan masalah sebagai berikut pertama, bagaimana implementasi kebijakan tentang pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis ?, kedua, bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tentang pengembangan Destinasi Wisata situs Astana Gede Kawali yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis ?, Ketiga, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis guna mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tentang pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Informan penelitian ini sebanyak 6 orang informan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : implementasi kebijakan tentang pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pendapat informan yang menyatakan lebih dari setengah indikator kerja yang diajukan oleh peneliti belum berjalan dengan baik. Adanya hambatan-hambatan yang dirasakan seperti kesibukan masing-masing instansi dengan program kebijakannya, keterbatasan pemahaman masyarakat dalam sosialisasi, SDM belum cekatan, keterbatasan jumlah serta kompetensi pegawai, kurang kuatnya will pimpinan, keterbatasan anggaran, terdapatnya egosentris diantara para pelaksana kebijakan, belum adanya regulasi insentif untuk non PNS, sulit mengaplikasikan tugas sesuai SOP ke masyarakat, adanya perbedaan kepentingan, belum ada tata kelola SDM yang sesuai dengan bidangnya. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan seperti sharing dengan instansi-instansi terkait, melakukan sosialisasi, memperkuat komunikasi, mengadakan rekrutmen dan pembinaan pegawai, melakukan koordinasi, kerjasama dalam program instansi lain, membuat skala prioritas, menginput kebutuhan pegawai, memberikan informasi yang jelas ke masyarakat, menjalankan tugas sesuai dengan Undang-undang, mengajukan tata kelola SDM ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah).

Kata kunci :Implementasi, Kebijakan, Pengembangan

1. PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi ini pariwisata menjadi aspek penting dalam kemajuan suatu negara. Setiap negara berusaha untuk memanfaatkan potensi yang ada untuk menarik wisatawan berkunjung kenegaranya. Begitu pula dengan Indonesia, Pariwisata di Indonesia merupakan sektor yang cepat berkembang dan

dianggap sebagai salah satu sektor ekonomi yang dapat diperhitungkan.

Menurut Wardani, A. K. (2019), Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat menjadi andalan bagi setiap daerah dalam mengeksplorasi sumber daya ekonomi.

Potensi pariwisata di Indonesia yang sangat melimpah terdiri dari ribuan pulau yang

sudah terkenal akan keindahannya, berbagai macam suku bangsa dengan keunikannya tersendiri, yang memiliki potensi alam, sosial, dan budaya menjadi modal utama bagi pemerintah untuk memajukan sektor pariwisata agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Dasar hukum pengembangan pariwisata yang sesuai dengan prinsip pengembangan yaitu tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menjelaskan bahwa pariwisata adalah "Berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah".

Salah satu wilayah yang memiliki aneka ragam sumber daya baik alam, maupun budaya, yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah Kabupaten Ciamis. Potensi yang dapat dimanfaatkan seperti halnya objek wisata alam, budaya, maupun sejarah yang tidak kalah indah dengan daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia.

Di Kabupaten Ciamis banyak potensi yang dapat untuk menarik kunjungan wisatawan seperti Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali. namun sangat disayangkan dari sekian banyak obyek wisata di Kabupaten Ciamis hanya Astana Gede Kawali yang paling sedikit pengunjungnya dari tahun ketahun, padahal jika terdapat produk kebijakan yang sesuai untuk pengembangan wisata tersebut maka Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali sangat menarik untuk dikunjungi sebab selain sebagai taman cagar budaya dan sebagai obyek wisata budaya, Astana Gede Kawali juga merupakan obyek ilmu pengetahuan.

Dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2011 Pengembangan kawasan destinasi pariwisata dilakukan melalui penataan kawasan dan jalur pariwisata, penyediaan sarana dan prasarana, dan pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup. Namun pada kenyataannya kebijakan tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan di Astana Gede Kawali.

Dari hasil penjajagan awal yang dilaksanakan oleh peneliti di objek penelitian, diketahui bahwa implementasi kebijakan tentang pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali masih belum optimal, hal itu dapat dilihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut :

1. Masih kurangnya sarana dan parasarana sebagai penunjang dalam pengembangan pariwisata. Seperti tidak adanya kios-kios untuk pedagang, padahal dengan adanya kios masyarakat dapat ikut berpartisipasi dengan berjualan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
2. Kurangnya persamaan persepsi diantara implementor dalam pelaksanaan program kebijakan pengembangan destinasi wisata situs Astana Gede Kawali. Seringkali terjadi perbedaan pendapat sehingga jika akan melaksanakan kebijakan dalam pengembangan destinasi wisata situs Astana Gede Kawali banyak hambatan karena harus menyamakan persepsi terlebih dahulu sehingga dalam pengimplementasian kebijakan tersebut memakan waktu yang lama.
3. Masih kurangnya hubungan koordinasi dengan instansi-instansi terkait. Seperti kurangnya kerjasama yang baik antara Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis dengan Pemerintah Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis sebagai pemilik tanah yang berada di dekat Astana Gede Kawali, yang dapat dimanfaatkan untuk dibangun sesuatu yang bisa menarik kunjungan wisatawan.

Dari masalah-masalah yang terjadi tersebut, perlunya penyelesaian yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis terhadap implementasi kebijakan tentang pengembangan Destinasi Wisata situs Astana Gede Kawali. Diantaranya dengan memperhatikan hal-hal yang dapat disesuaikan dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III (Agustino, 2017 : 136-141), keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat ditentukan oleh empat variable, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

2. LANDASAN TEORITIS

Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan tentang pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis, maka diambil beberapa teori yang relevan untuk

dijadikan referensi dalam penelitian ini, teori tersebut diambil dari beberapa sumber mengenai implementasi kebijakan pengembangan destinasi wisata dan beberapa teori pendukung lainnya.

Menurut Purwanto (2015 : 21) “ Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan”.

Sedangkan menurut Tahir (2014 : 56) implementasi diartikan sebagai berikut :

Implementasi diartikan sebagai upaya melakukan, mencapai, memenuhi, dan menghasilkan. Dalam berbagai praktek, terlihat bahwa suatu keputusan telah ditetapkan, tidak selalu dilaksanakan dengan tertib dan rapi. Seandainya suatu rencana keputusan yang terdiri dari seperangkat tujuan/sasaran, saran dan waktu yang dipilih dan ditetapkan dalam implementasinya, banyak terjadi bahwa keputusan tersebut hampir selalu harus disesuaikan lagi.

Selanjutnya pengertian implementasi menurut Mulyadi (2015 : 12) didefinisikan sebagai berikut :

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan - tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Kemudian kebijakan publik menurut Irfan Islami (Sobirin, 2017 : 34) ‘Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat’.

Sedangkan pengertian kebijakan publik menurut Holl (Ginting, 2015 : 4) yaitu : ‘Kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah dimasyarakat baik secara langsung maupun berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat’.

Lebih lanjut William I. Jenkins (Agustino, 2017 : 16 - 17) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah sebagai berikut :

Menurutnya kebijakan publik sebagai sebuah proses tidak seperti Dye yang menilainya sebagai pilihan pemerintah. Bahkan lebih jelas lagi, Jenkins menyatakan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berhubungan dalam kata lain, Jenkins hendak menjelaskan bahwa kebijakan merupakan proses pembuatan keputusan yang komprehensif menyertakan banyak *stakeholders*.

Menurut Barrett (Agustino, 2017 : 128) pengertian implementasi kebijakan adalah: ‘... *translating policy into action*’ atau bila diterjemahkan secara sederhana berarti menerjemahkan kebijakan kedalam tindakan. ‘Jadi implementasi kebijakan adalah menjalankan konten atau isi kebijakan kedalam aplikasi yang diamanatkan oleh kebijakan itu sendiri’.

Sedangkan Winarno (2016 : 133) memberikan definisi implementasi kebijakan sebagai berikut: “Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan”.

Lebih lanjut pengertian implementasi kebijakan menurut Abdul Wahab (Tahir, 2014 : 55) yaitu:

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan /sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Dalam implementasi kebijakan tentang pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali, dalam penelitian ini Pengembangan diartikan sebagai proses atau perbuatan pengembangan dari suatu hal yang sebelumnya belum ada, dari yang sudah ada

menjadi lebih baik dan dari yang sudah baik menjadi lebih baik, demikian dalam konteks objek yang sedang diteliti, yaitu Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali.

Menurut Supriadi (2017 : 38) komponen-komponen pengembangan destinasi pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Daya Tarik Wisata (*Atractions*), yang mencakup : daya tarik yang berbasis utama pada kekayaan alam, budaya, maupun buatan/artificial. Seperti event atau yang sering disebut sebagai minat khusus (*special interest*).
2. Aksebilitas (*accessibility*), yang mencakup dukungan sistem transportasi yang meliputi : rute atau jalur transportasi, fasilitas terminal, bandara, pelabuhan dan transportasi yang lain.
3. Amenitas (*Amenities*), yang mencakup fasilitas penunjang dan pendukung wisata yang meliputi : akomodasi, rumah makan (food and baverage), retail, toko cinderamata, fasilitas penukaran uang, biro perjalanan, pusat informasi wisata, dan fasilitas kenyamanan lainnya.
4. Fasilitas pendukung (*Ancillary Services*) yaitu ketersediaan fasilitas pendukung yang digunakan oleh wisatawan, seperti bank, telekomunikasi, pos, rumah sakit, dan sebagainya.
5. Kelembagaan (*Institution*) yaitu terkait dengan keberadaan dan peran masing - masing unsur dalam mendukung terlaksananya kegiatan pariwisata termasuk masyarakat setempat sebagai tuan rumah (host).

Menurut Sedarmayanti (2018 : 37) bila pembangunan dan pengembangan pariwisata direncanakan dan diarahkan dengan baik, maka akan banyak manfaat dan dampaknya antara lain :

1. Manfaat Ekonomi

Meningkatkan arus wisatawan baik nusantara maupun mancanegara ke suatu daerah menuntut aneka ragam pelayanan dan fasilitas yang semakin meningkat jumlah dan ragamnya. Hal ini memberi manfaat ekonomi bagi penduduk, pengusaha maupun pemerintah setempat antara lain:

- a. Penerimaan devisa.
 - b. Kesempatan berusaha.
 - c. Terbukanya lapangan kerja.
 - d. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan pemerintah.
 - e. Mendorong pembangunan daerah.
 - f. Pendapatan daerah (PAD).
2. Manfaat Sosial Budaya
 - a. Pelestarian budaya dan adat istiadat.
 - b. Meningkatkan kecerdasan masyarakat.
 - c. Meningkatkan kesehatan dan kesegaran jasmani atau rohani.
 - d. Mengurangi konflik sosial.
 3. Manfaat Dalam Berbangsa dan Bernegara
 - a. Mempererat persatuan dan kesatuan.
 - b. Menumbuhkan rasa memiliki, keinginan untuk memiliki dan mempertahankan negara yang ujungnya tumbuh rasa cinta terhadap Tanah air.
 - c. Memelihara hubungan baik internasional dalam hal pengembangan pariwisata.
 4. Manfaat bagi Lingkungan
Pembangunan dan pengembangan pariwisata diarahkan agar dapat memenuhi keinginan wisatawan, seperti : hidup tenang, bersih, jauh dari polusi, santai dapat mengembalikan kesehatan fisik dan mental. Oleh sebab itu, pengembangan pariwisata merupakan salah satu cara dalam upaya untuk melestarikan lingkungan, di samping akan memperoleh nilai tambah atas pemanfaatan dari lingkungan yang ada.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sebagaimana yang diungkapkan menurut Nazir penelitian deskriptif (2011 : 54) yaitu:

Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu sekelompok manusia, objek, kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang . Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Menurut Ludico, Spaulding, dan Voegtler (Emzir, 2010 : 2) pengertian penelitian kualitatif sebagai berikut:

Penelitian kualitatif, yang juga disebut penelitian interpretatif atau penelitian lapangan adalah suatu metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi dan diadaptasi dalam setting pendidikan. Peneliti kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan dapat diungkapkan. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan pada pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan dibawah studi. Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari setting sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian yaitu dilakukan dimulai pada 01 Februari 2019 sampai dengan 31 Juli 2019.

Tempat penelitian yang peneliti lakukan adalah dilakukan di Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis dan UPTD Dinas Pariwisata Wilayah Kawali, serta dikawasan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali.

3.3 Subjek Penelitian

Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 6 (enam) orang informan yang terdiri dari :

- a) Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis.
- b) Kasi Bidang Atraksi Wisata (Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis).
- c) Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman (Dinas Kebudayaan dan Pemuda Olahraga).
- d) Teknisi (Balai Konservasi Sumber Daya Alam).
- e) Kepala UPTD Pariwisata Wilayah Kawali Kabupaten Ciamis.
- f) Kepala Desa Kawali.

Dalam menentukan Informan sebagai sumber data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Penentuan teknik ini agar didapati informasi dengan tingkat validitas dan reabilitas yang tinggi. Tentang teknik *purposive sampling*.

3.4 Data, Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui jawaban dengan wawancara langsung dengan para informan, yaitu dengan instansi terkait yang memiliki legitimasi sebagai pembuat kebijakan. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, yaitu gambaran umum mengenai Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali, foto-foto dokumentasi, data-data terkait informasi Astana Gede Kawali, buku dan peraturan terkait kepariwisataan, Tupoksi Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis, katalog destinasi wisata Kabupaten Ciamis, literatur, bahan kepustakaan, dokumen atau buku, tabel serta bagan.

Beberapa teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur dan sumber bacaan seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- b. Studi Lapangan, yaitu teknik mengumpulkan, meneliti dari lokasi penelitian. Pelaksanaan studi lapangan dilakukan dengan cara :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan oleh Emzir (2010 : 37) sebagai berikut :Perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Adapun observasi ilmiah adalah perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian, atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya. (Garayibah,et.al 1981:33).

2. Wawancara

Menurut Hasan (Emzir, 2010 : 39) Wawancara dapat didefinisikan sebagai berikut :

Interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya.

3. Studi Dokumentasi

Disamping observasi partisipan dan wawancara, para peneliti kualitatif dapat juga menggunakan berbagai dokumen dalam menjawab pertanyaan terarah. Dalam penelitian ini, dokumen yang disajikan oleh peneliti berupa informasi-informasi terkait yang dibutuhkan dan digunakan pada hasil dan pembahasan nantinya, untuk memperkuat, mendasari sebuah pemikiran, atau membuktikan deskripsi yang penulis sampaikan. Dokumen diperoleh dari Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis, serta dokumen lainnya berupa lampiran skripsi, melalui peraturan dan kebijakan atau peraturan terkait, transkrip wawancara, dan foto-foto dokumentasi terkait objek yang diteliti.

3.5 Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (Gunawan, 2014 : 210) mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Menurut Sugiyono (2014 : 247) definisi mereduksi data yaitu sebagai berikut:

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Temuan yang dipandang asing, dan tidak dikenal, dan belum memiliki pola, maka hal itulah yang dijadikan perhatian karena penelitian kualitatif bertujuan mencari pola dan makna yang tersembunyi dibalik pola dan data yang tampak.

2. Data *Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dilakukan berdasarkan data telah terkumpul dari semua informan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya kemudian peneliti menganalisis untuk selanjutnya dikategorikan mana yang diperlukan dan tidak diperlukan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif dan tabel yang disajikan dengan sistematis untuk memberikan gambaran secara jelas kepada pembaca. Setelah data diperoleh maka data tersebut disajikan dalam bentuk informasi yang kemudian dikaitkan dengan dokumen yang ada ataupun kerangka pemikiran yang menjadi panduan serta teori yang digunakan. Sehingga semua informasi yang

ditampilkan mempunyai makna dan arti kepada pembaca.

3. *Conclusion Drawing/ Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan dapat diambil setelah melakukan analisis mendalam pada hasil penelitian. Dengan melakukan verifikasi, dapat terlihat apakah rumusan masalah penelitian sudah terjawab, dan tujuan penelitian sudah tercapai. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan untuk menguji kebenaran serta mencocokkan informasi yang ada untuk kemudian diperoleh data yang valid dan jelas. Selain itu, penarikan kesimpulan dilakukan untuk memberi deskripsi singkat dari banyaknya informasi yang diperoleh serta mendapatkan informasi akhir.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan tentang pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis dengan menggunakan teori yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, maka dengan ini ditarik indikator-indikator yang digunakan yakni :

1. Komunikasi, yaitu : Cara yang dilakukan untuk menyampaikan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan atau implementasi program. Dengan indikator - indikator sebagai berikut:

- a) Kejelasan komunikasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis kepada instansi-instansi terkait dalam pengembangan destinasi wisata.
- b) Pelaksanaan sosialisasi yang jelas kepada masyarakat.
- c) Konsistensi perintah mengenai pencapaian tujuan implementasi kebijakan pengembangan destinasi wisata.

2. Sumberdaya, yaitu : Kemampuan yang dimiliki dan menjadi pendukung proses pelaksanaan program, yakni sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya. Dengan indikator-indikatornya sebagai berikut :

- a) Kecukupan staf yang berkompeten dalam bidang tugasnya.
- b) Ketersediaan informasi yang diperlukan mengenai implementasi

- kebijakan pengembangan destinasi wisata.
- c) Kecukupan wewenang pada aparatur birokrasi.
 - d) Ketersediaan fasilitas yang mendukung pengembangan destinasi wisata.
3. Disposisi, yaitu : Komitmen dan sikap yang dimiliki para pelaksana program untuk melaksanakan keseluruhan kegiatan implementasi kebijakan pengembangan destinasi wisata. Dengan indikator - indikator sebagai berikut :
- a) Komitmen dan sikap para pelaksana kebijakan.
 - b) Adanya persamaan persepsi antara implementor dengan dinas-dinas terkait dalam pelaksanaan pengembangan destinasi wisata.
 - c) Kecukupan insentif bagi implementor.
4. Struktur birokrasi, yaitu : Adanya suatu prosedur yang mengatur tata dan pola aliran pekerjaan dalam proses implementasi program. Dengan Indikator - indikator sebagai berikut:
- a) Ketersediaan Standar Operating Procedures (SOP) bagi implementor.
 - b) Hubungan koordinasi yang baik dengan instansi-instansi terkait.
 - c) Kejelasan instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

A. Pembahasan Mengenai Implementasi Kebijakan tentang Pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis

Pembahasan mengenai implementasi kebijakan tentang pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis dengan berdasarkan teori yang telah dikemukakan oleh George C. Edward III (Agustino, 2017 : 136-141). Bahwa diperlukan model-model implementasi kebijakan dalam pengembangan destinasi wisata. Adapaun model-model implementasi kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hal tersebut, kemudian peneliti dapat menjelaskan mengenai hasil wawancara setiap informan penelitian dan observasi di lapangan mengenai implementasi kebijakan tentang pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis dengan mengacu pada dimensi atau sub variabel sebagai berikut :

1. Dimensi Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi komunikasi dalam indikator kejelasan komunikasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis kepada instansi-instansi terkait dalam pengembangan destinasi wisata sudah jelas dan dilaksanakan dengan baik, yang dilakukan dalam bentuk sanksi bertindak, dalam bentuk perintah dan komunikasi secara langsung, juga dalam bentuk kerjasama antar instansi yang berkepentingan. Ini tentunya sebuah pencapaian yang bagus karena kunci utama dalam berbagai kebijakan yang dibuat adalah komunikasi.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi komunikasi bahwa indikator pelaksanaan sosialisasi yang jelas kepada masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik. Ini terbukti dengan pelaksanaan sosialisasi yang jelas kepada masyarakat dilakukan secara terbuka dan transparan kepada publik karena tidak hanya dilakukan kepada masyarakat tetapi juga kepada anak-anak disekolah.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi komunikasi untuk indikator konsistensi perintah mengenai pencapaian tujuan implementasi kebijakan pengembangan destinasi wisata memang sudah dilaksanakan dengan baik. Ini terbukti dengan berbagai kebijakan program yang dibuat cukup terencana dan terjadwal sehingga hal ini menjadikan perintah-perintah tersebut konsisten dilakukan.

2. Dimensi Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi sumber daya indikator kecukupan staff yang berkompeten dalam bidang tugasnya belum tercukupi, hal ini disebabkan karena kurangnya pembinaan pegawai dan pengangkatan pegawai oleh pemerintah. Padahal jika sebuah konsep kebijakan sudah dibuat sedemikian rupa bagusnya tapi dalam pelaksanaan SDM-nya masih kurang, apalagi yang berkompeten maka hal tersebut tidak dapat berjalan dengan baik,

karena tidak ada orang yang dapat mengendalikannya dengan tepat.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada dimensi sumber daya bahwa indikator ketersediaan informasi yang diperlukan mengenai implementasi kebijakan pengembangan destinasi wisata sudah cukup baik, yang disampaikan dengan jelas, yang dilaksanakan dalam berbagai cara, seperti diadakan rapat koordinasi, penyampaian informasi lewat surat maupun komunikasi dengan media sosial ataupun sosialisasi. Namun sangat disayangkan ketika ada media yang memuat khusus mengenai informasi tentang kepariwisataan hal tersebut belum dapat dimanfaatkan dengan baik. Karena tidak adanya SDM yang mampu mengoperasikan media tersebut.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi sumber daya untuk indikator kecukupan wewenang pada aparatur birokrasi sudah ada namun belum berjalan dengan optimal. Hal ini karena perbedaan kewenangan antar instansi yang kalau disatukan memang bisa tapi itu tergantung bagaimana pimpinan yang mengarahkannya.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi sumber daya dalam indikator ketersediaan fasilitas yang mendukung pengembangan destinasi wisata di Astana Gede Kawali masih kurang. Seperti belum terdapatnya kios-kios untuk masyarakat berjualan setidaknya dapat berjualan cenderamata atau makanan khas daerah setempat, kemudian selebihnya dibutuhkan fasilitas yang dapat menarik pengunjung.

3. Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi disposisi untuk indikator komitmen dan sikap para pelaksana kebijakan belum berjalan dengan baik. Komitmen tidak hanya dilakukan oleh para pelaksana kebijakan saja tetapi juga harus dilakukan dengan pimpinannya itu sendiri begitupun dengan sikap yang dapat diambil itu juga berawal dari level yang di atasnya. Komitmen dan sikap para pelaksana kebijakan penting dilakukan sejak awal untuk menentukan arah kebijakan sendiri akan seperti apa kedepannya begitupun dengan sikap para pelaksana kebijakan itu sendiri.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi disposisi dalam indikator persamaan persepsi antara implementor dengan dinas-dinas terkait dalam

pelaksanaan pengembangan destinasi wisata belum berjalan baik. Hal ini karena terbatasnya kewenangan diantara instansi-instansi tersebut sehingga menyebabkan sulitnya menyatukan persamaan persepsi antara implementor dengan dinas-dinas terkait dalam pelaksanaan pengembangan destinasi wisata situs Astana Gede Kawali.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dan observasi dalam dimensi disposisi pada indikator kecukupan insentif bagi implementor memang masih kurang untuk Non-PNSnya. Bahkan tidak sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dalam tugasnya hal ini disebabkan karena belum adanya regulasi yang mengatur hak insentif untuk non PNS. Padahal dengan adanya insentif yang sesuai dapat memotivasi para pegawai untuk dapat meningkatkan kinerjanya dalam bekerja serta menjadi penyemangat untuk lebih berprestasi hal ini mendatangkan motivasi yang positif untuk dirinya dan untuk organisasi itu sendiri.

4. Struktur birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi struktur birokrasi untuk indikator ketersediaan Standar Operating Procedures (SOP) sudah ada dan sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang ada. Bagaimana tata cara merawat benda-benda cagar budaya, ada juga izin memasuki kawasan jamnya sudah diatur.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada dimensi struktur birokrasi untuk indikator hubungan koordinasi yang baik dengan instansi-instansi terkait belum dapat berjalan dengan optimal. Hal ini terhambat karena perbedaan visi misi maupun kepentingan instansi-instansi terkait padahal jika hubungan koordinasi tersebut sudah baik maka akan mempermudah dalam mengambil keputusan dalam sebuah kebijakan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada dimensi struktur birokrasi bahwa indikator kejelasan instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan sudah jelas sesuai dengan tugasnya. Tinggal dibutuhkannya arahan dari pimpinan konsep yang akan dibuat seperti apa dan lebih mempertimbangkan kembali instansi-instansi yang sekiranya kewenangannya berkaitan mengapa harus dipisah?. Padahal hal tersebut justru akan mempersulit jalannya sebuah birokrasi. Kemudian dibutuhkannya saling dukung antar instansi tersebut agar lebih mempererat hubungan kerjasama.

B. Hambatan-Hambatan Implementasi Kebijakan tentang Pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan peneliti melihat memang bahwa mengenai implementasi kebijakan tentang pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis masih menghadapi hambatan-hambatan. Kemudian hambatan-hambatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Dimensi Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi komunikasi hambatan dalam indikator kejelasan komunikasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis kepada instansi-instansi terkait dalam pengembangan destinasi wisata hambatannya dari segi penyatuan waktu yang tepat dengan instansi-instansi terkait hal ini disebabkan karena masing-masing institusi mempunyai beberapa program di institusinya sendiri dan pasti membutuhkan waktu, sedangkan untuk komunikasinya dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis biasanya dengan cara rapat koordinasi sedangkan untuk hadir dalam acara tersebut sangat susah karena harus mengatur waktu yang tepat dengan pemangku-pemangku kepentingan tersebut.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi komunikasi hambatan dalam indikator pelaksanaan sosialisasi yang jelas kepada masyarakat yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang apa yang telah disampaikan dalam sosialisasi. Padahal dalam era demokrasi ini menghendaki adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam sebuah perumusan kebijakan sehingga kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat terealisasi.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi komunikasi hambatan dalam indikator konsistensi perintah mengenai pencapaian tujuan implementasi kebijakan pengembangan destinasi wisata yaitu keterbatasan kompetensi SDM yang ada belum terlalu cekatan dalam bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan hal ini bisa disebabkan karena beberapa faktor yaitu masih kurangnya pembinaan pada pegawai, insentif yang kurang maupun kurangnya jumlah SDM yang ada.

2. Dimensi Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi sumber daya hambatan dalam indikator kecukupan staff yang berkompeten dalam bidang tugasnya yaitu bersumber dari belum adanya kebijakan untuk menambah jumlah pegawai hal ini berdampak pada krisis pegawai dan yang ada pun masih sangat terbatas.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada dimensi sumber daya hambatan dalam indikator ketersediaan informasi yang diperlukan mengenai implementasi kebijakan pengembangan destinasi wisata yaitu bersumber dari keterbatasan kompetensi SDM. Selama ini SDM menjadi sumber dari hambatan di setiap indikator karena baik dari segi jumlah pegawainya, kompetensinya maupun kemampuan dalam mengimplementasikan kebijakan selama ini masih kurang.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada dimensi sumber daya hambatan dalam indikator kecukupan wewenang pada aparatur birokrasi pada dimensi sumber daya hambatan dalam indikator aparatur birokrasi bersumber dari kurang kuatnya will dari pimpinan sebagai penyambung wewenang yang berbeda sehingga sampai saat ini masalah tersebut belum menemukan solusi yang tepat.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi sumber daya hambatan dalam indikator ketersediaan fasilitas yang mendukung pengembangan destinasi wisata di Astana Gede Kawali bersumber dari keterbatasan anggaran. Padahal untuk menarik wisatawan berkunjung salah satunya dengan adanya fasilitas yang memadai serta menarik agar mempunyai ciri khas, pemerintah sudah semestinya menyediakan anggaran yang memadai.

3. Dimensi Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi disposisi hambatan dalam indikator komitmen dan sikap para pelaksana kebijakan bersumber dari masih terdapatnya egosentris diantara para pelaksana kebijakan tersebut. Bahwa selama ini hambatan dalam komitmen dan sikap para pelaksana kebijakan sebenarnya saling keterkaitan satu sama lain, masalahnya sangat kompleks tetapi bisa diatasi jika sejak awal sudah dibangun komitmen yang kuat.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi disposisi hambatan dalam indikator persamaan persepsi antara implementor dengan dinas-dinas terkait dalam pelaksanaan pengembangan destinasi wisata bersumber dari perbedaan sistem kewenangan yang dimiliki masing-masing dinas terkait sehingga menjadikan kewenangan yang dimiliki menjadi terbatas dan sulit menyatukan persamaan persepsi.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi disposisi hambatan dalam indikator kecukupan insentif bagi implementor yaitu karena belum adanya aturan yang mengatur untuk insentif Non-PNS. Hal ini tentunya bentuk ketidakadilan karena banyak juga yang belum PNS tapi mereka sudah tua bahkan sudah berpengalaman hal ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi struktur birokrasi hambatan untuk indikator ketersediaan Standar Operating Procedures (SOP) bagi implementor sudah ada dan sudah dijalankan sesuai dengan SOP yang ada namun menemui hambatan disebabkan seperti sulitnya mengaplikasikan tugas sesuai dengan SOP yang ada ke masyarakat karena perbedaan pemahaman. Banyak masyarakat yang belum mengetahui berbagai aturan yang boleh atau tidak boleh dilakukan di Astana Gede Kawali.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi struktur birokrasi hambatan dalam indikator hubungan koordinasi yang baik dengan instansi-instansi terkait disebabkan adanya perbedaan kepentingan sehingga menyebabkan saling lempar tanggung jawab antar instansi tersebut. Perbedaan kepentingan diantara instansi-instansi terkait memang wajar adanya tetapi bagaimana untuk menyatukannya sehingga tidak ada lagi batas diantara instansi-instansi tersebut.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi struktur birokrasi hambatan indikator kejelasan instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan belum ada tata kelola SDM yang sesuai dengan kemampuan dalam bidangnya masing-masing. Hal ini akan menghambat dalam implementasi kebijakan karena kompetensi yang

tidak sesuai dapat mengakibatkan lamanya kebijakan tersebut dapat diimplementasikan.

C. Upaya-Upaya yang Dilakukan untuk Menanggulangi Hambatan-Hambatan yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan tentang Pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan hasil observasi peneliti di lapangan diketahui bahwa adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mempengaruhi implementasi kebijakan tentang pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis dilakukan beberapa upaya.

Dalam hal ini upaya-upaya yang dilakukan pada indikator-indikator sebagai dasar ukurannya terdapat 13 (tiga belas) indikator yang memerlukan upaya-upaya guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Upaya-upaya yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Dimensi Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi komunikasi upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam indikator kejelasan komunikasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis kepada instansi-instansi terkait dalam pengembangan destinasi wisata yaitu dengan sharing mengenai program kebijakan dengan institusi-institusi terkait sehingga bisa saling bertukar informasi serta dapat bekerjasama dalam pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi komunikasi upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam indikator pelaksanaan sosialisasi yang jelas kepada masyarakat yaitu melakukan sosialisasi secara terpadu dan berkelanjutan. Masyarakat yang ikut serta dalam sosialisasi tersebut dilakukan secara bergantian hal ini dimaksudkan agar antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain dapat saling bertukar informasi dalam sosialisasi yang berbeda.

kemudian berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi komunikasi upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan untuk indikator konsistensi perintah mengenai pencapaian tujuan implementasi kebijakan pengembangan destinasi wisata yaitu dengan komunikasi yang jelas serta intens dengan para

pemangku kebijakan agar menjadikan perintah-perintah tersebut dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat sasaran.

2. Dimensi Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi sumber daya upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam indikator kecukupan staff yang berkompeten dalam bidang tugasnya yaitu dengan cara rekrutmen pegawai dan pembinaan pada pegawai. Rekrutmen pegawai sendiri dilakukan untuk mengatasi krisis pegawai sehingga dengan jumlah pegawai tertentu dapat mempercepat proses berbagai kebijakan, sedangkan pembinaan pegawai sangat penting dilakukan ini tujuannya untuk menambah kompetensi pegawai yang ada.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi sumber daya upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam indikator ketersediaan informasi yang diperlukan mengenai implementasi kebijakan pengembangan destinasi wisata yaitu dengan pembinaan pada pegawai. Banyak pegawai atau para pelaksana kebijakan itu sendiri tidak mengetahui apa saja informasi yang diperlukan untuk menunjang sebuah pengembangan destinasi wisata baik itu dari segi aturannya maupun sanksi bagi pelanggar aturan tersebut.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi sumber daya upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam indikator kecukupan wewenang pada aparatur birokrasi yaitu dengan melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam pengembangan destinasi wisata situs Astana Gede Kawali. Jadi tidak dengan saling diskriminasi karena perbedaan kewenangan yang dimiliki masing-masing instansi, dengan hal tersebut maka pengembangan di Astana Gede Kawali dapat diimplementasikan dengan baik. Hal ini tentunya dapat berdampak juga pada jumlah kunjungan wisatawan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi sumber daya upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam indikator ketersediaan fasilitas yang mendukung pengembangan destinasi wisata ialah kerjasama dalam berbagai program kebijakan dengan instansi-instansi lain sehingga mendatangkan sumber pendapatan di luar anggaran yang tersedia, ini ditujukan supaya tidak terpaksa pada anggaran yang ada. Hal itu tentu sebuah upaya

yang baik karena dengan hal tersebut dapat mempererat hubungan kerjasama serta ikut berpartisipasi dalam berbagai program kebijakan instansi-instansi lain juga dapat sharing saling bertukar informasi terhadap berbagai kebijakan yang telah dibuat.

3. Dimensi Disposisi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi disposisi upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam indikator komitmen dan sikap para pelaksana kebijakan ialah dengan membina hubungan kerjasama yang baik secara kekeluargaan dan saling dukung. Hal ini dilakukan karena biasanya dengan menciptakan suasana dalam lingkungan kerja yang baik akan berdampak pula pada keberhasilan pencapaian tujuan yang ingin dicapai.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi disposisi upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam indikator persamaan persepsi antara implementor dengan dinas-dinas terkait dalam pelaksanaan pengembangan destinasi wisata yaitu dengan melakukan pertemuan dengan pemangku-pemangku kepentingan dan membuat skala prioritas untuk menyamakan persepsi. Skala prioritas disini tujuan yang hendak dicapai, hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir perbedaan paham antara implementor dengan dinas-dinas terkait pengembangan destinasi wisata situs Astana Gede Kawali sehingga dapat menyamakan persepsi.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi disposisi upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam indikator kecukupan insentif bagi implementor yaitu dengan cara menginput kebutuhan pegawai ke BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia). Hal ini dilakukan sebab belum adanya regulasi yang mengatur insentif untuk non PNS hal tersebut telah diupayakan salah satunya ke BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) dengan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang pegawai butuhkan.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi struktur birokrasi upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam indikator ketersediaan Standar Operating Procedures (SOP) bagi implementor yaitu dengan memberikan informasi yang jelas tentang berbagai program kebijakan sesuai dengan SOP yang ada kepada masyarakat. Karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui berbagai aturan yang boleh atau tidak boleh diambil alih tugasnya oleh masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi struktur birokrasi upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam indikator hubungan koordinasi yang baik dengan instansi-instansi terkait yaitu dengan menjalankan tugas sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang dan apa yang telah diinformasikan seperti ketika diadakan rapat koordinasi antar instansi-instansi terkait, untuk kegiatan di Astana Gede Kawali agar bisa menarik kunjungan wisatawan maka diadakan sebuah kegiatan atraksi wisata. Maka Dinas Pariwisata bertugas untuk mempromosikannya, jadi hal tersebut sudah ada pembagian tugas masing-masing.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pada dimensi struktur birokrasi upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam indikator kejelasan instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan yaitu dengan mengajukan pengusulan SDM yang sesuai dengan kompetensi dalam bidangnya ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah). Hal ini untuk mempermudah dalam melaksanakan berbagai kebijakan agar lebih efektif serta sesuai dan tepat sasaran.

5. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan mulai dari pengumpulan data, sampai pada analisis data dalam penelitian ini, kemudian peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan tentang pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis sebagian sudah dilaksanakan baik, dan sebagian lagi masih kurang/belum baik. Dimana hasil wawancara maupun observasi menunjukkan bahwa untuk

indikator-indikator kejelasan komunikasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis kepada instansi-instansi terkait dalam pengembangan destinasi wisata, pelaksanaan sosialisasi yang jelas kepada masyarakat, konsistensi perintah mengenai pencapaian tujuan implementasi kebijakan pengembangan destinasi wisata, ketersediaan informasi yang diperlukan mengenai implementasi kebijakan pengembangan destinasi wisata, ketersediaan Standar Operating Procedures (SOP) bagi implementor, kejelasan instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, indikator-indikator itu sudah baik. Namun untuk indikator-indikator kecukupan staff yang berkompeten dalam bidang tugasnya, kecukupan wewenang pada aparatur birokrasi, ketersediaan fasilitas yang mendukung pengembangan destinasi wisata, komitmen dan sikap para pelaksana kebijakan, persamaan persepsi antara implementor dengan dinas-dinas terkait dalam pelaksanaan pengembangan destinasi wisata, kecukupan insentif bagi implementor, hubungan koordinasi dengan instansi-instansi terkait, indikator-indikator itu masih kurang/ belum baik.

2. Berdasarkan hasil wawancara maupun observasi menunjukkan bahwa adanya hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tentang pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis seperti adanya keterbatasan waktu diantara instansi-instansi terkait pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali karena masing-masing instansi mempunyai kesibukannya sendiri dengan program kebijakannya, kemudian adanya keterbatasan pemahaman masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi, SDM yang ada belum terlalu cekatan dalam bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan, adanya keterbatasan jumlah pegawai, masih terdapatnya keterbatasan kompetensi pegawai, kurang kuatnya will dari pimpinan, adanya keterbatasan anggaran dalam fasilitas yang mendukung pengembangan Destinasi Wisata Situ Astana Gede Kawali, masih terdapatnya egosentris diantara para pelaksana kebijakan, terbatasnya kewenangan sehingga sulit menyatukan persamaan persepsi, belum adanya regulasi yang mengatur insentif untuk non PNS, sulitnya mengaplikasikan tugas sesuai dengan SOP ke masyarakat karena perbedaan pemahaman,

- adanya perbedaan kepentingan sehingga adanya saling lempar tanggung jawab, belum adanya tata kelola SDM yang sesuai dengan kemampuan dalam bidangnya masing-masing.
3. Upaya-upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam mengimplementasikan kebijakan tentang pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis berdasarkan hasil wawancara maupun observasi diantaranya dengan cara sharing dengan instansi-instansi terkait pengembangan destinasi wisata, kemudian melakukan sosialisasi secara terpadu dan berkelanjutan, memperkuat komunikasi dengan instansi-instansi terkait, mengadakan rekrutmen pegawai, diadakannya pembinaan pegawai, melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait, bekerjasama ikut program dengan instansi lain sehingga dapat menjadi sumber pendapat lain sehingga tidak terpaku pada anggaran, membina hubungan kerjasama secara kekeluargaan dan saling dukung dengan instansi-instansi terkait, melakukan pertemuan-pertemuan dengan pemangku kebijakan dengan membuat skala prioritas untuk meminimalisir perbedaan persepsi, menginput kebutuhan pegawai ke BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia), memberikan informasi yang jelas tentang program kebijakan yang ada dalam SOP kepada masyarakat, dapat menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang yang telah diatur, mengajukan tata kelola SDM yang sesuai ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah).
- Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Analisis Data*. Jakarta:
PT Gravindo Persada.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ginting, Rosalina dan Noor, Manawar. 2015. *Kebijakan Publik*. Semarang : Universitas PGRI Semarang Press.
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sedarmayanti et.al. 2018. *Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Sore, B. Udin dan Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makasar : Cv Sah Media.
- Supriadi, Bambang dan Roedjinandari, Nanny. 2017. *Perencanaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Malang : Universitas Negeri Malang.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Cetakan Kesatu*. Bandung : Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi : Teori, Proses, dan Studi, Kasus Komparatif*. Jakarta : CAPS.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik cetakan kesatu*. Bandung : Alfabeta CV.
- Supriadi, Bambang dan Roedjinandari, Nanny. 2017. *Perencanaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Malang : Universitas Negeri Malang.
- Wardani, A. K. (2019). Mendefinisikan Kembali Situ Mustika (Sebuah Analisis Revitalisasi Objek Wisata). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(4), 47-55.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (edisi revisi)*. Bandung : Alfabeta.